

Analisis Konflik Palestina-Israel Melalui Lensa Filsafat Hannah Arendt

Analyzing the Palestine-Israel Conflict Through Hannah Arendt's Philosophical Lens

Fenskha Thaliah^{a,1},

^aMagister Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Jl. Jend. Sudirman No.50, Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
fenskha.efendi@gmail.com¹,

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis dinamika konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel melalui kerangka pemikiran seorang filsuf Jerman yang bernama Hannah Arendt. Tiga konsep pemikiran Hannah Arendt yaitu, totalitarianism, kekuasaan dan kekerasan, serta banalitas kejahatan digunakan sebagai kerangka konseptual dalam mengkaji kompleksitas permasalahan dari konflik ini. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi dinamika konflik dan relevansinya dengan pemikiran Arendt. Tujuan penulisan ini untuk mengupas konsep-konsep tersebut dan memberikan wawasan baru tentang konflik ini. Konsep ini juga menawarkan perspektif baru dalam mencari solusi atas permasalahan ini. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kerangka pemikiran Hannah Arendt masih tetap relevan dalam mengkaji konflik global era kontemporer ini. Selain itu, ketiga konsep tersebut menjadi elemen utama dalam memperparah konflik ini. Tidak hanya tindakan represif yang dilakukan oleh kedua pihak, namun ada faktor kegagalan masyarakat global dalam mengatasi konflik ini. Kerangka pemikiran Hannah Arendt ini menawarkan solusi untuk menghentikan konflik dengan dipelukan ruang dialog yang setara dan inklusif. Pendekatan ini diharapkan menjadi pintu menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Konflik Palestina-Israel, Hannah Arendt, Totalitarianisme, Kekerasan dan Kekuasaan, Banalitas Kejahatan

ABSTRACT

The paper's analyzes the dynamics of the prolonged conflict between Palestine and Israel through the framework of a German philosopher named Hannah Arendt. Three concepts of Hannah Arendt's thoughts namely, totalitarianism, power and violence, the banality of evil are used as a conceptual framework in examining the complexity of the problems of this conflict. This paper uses a qualitative research method with a descriptive approach to explore the dynamics of conflict and its relevance to Arendt's thinking. The purpose of this paper is to explore these concepts and provide new insights into this conflict. This concept also offers a new perspective in finding solutions to this problem. The result of this analysis show that Hannah Arendt's framework of thought is still relevant in studying the global conflict of the contemporary era. In addition, these three concepts are the main elements in exacerbating this conflict. Not only repressive actions carried out by both parties, but there is a factor of the failure of the global community in resolving this conflict. Hannah Arendt's framework of thought offers a solution to stop the conflict by embracing an equal and inclusive dialogue space. This approach is expected to be the door to sustainable peace.

Keywords : Palestine-Israel Conflict, Hannah Arendt, Totalitarianism, Violence and Power, Banality of Evil.

Info Artikel :

Disubmit: 09 Desember 2024

Direview: 15 Januari 2025

Diterima : 18 Februari 2025

Copyright © 2025 – PIR Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah mengakibatkan banyak kerugian dari berbagai aspek, hingga hilangnya tempat tinggal warga Palestina dari tanah kelahirannya. Awal mula konflik berkepanjangan ini yaitu surat perintah Arthur Balfour pada tahun 1917 untuk memindahkan kaum Yahudi di Eropa ke Palestina. Pemindahan kaum Yahudi ke Palestina tentu membangkitkan perlawanan dari warga Palestina. Konflik keduanya semakin memanas ketika Israel mengumumkan pendirian mereka sebagai sebuah negara merdeka pada tahun 1948. Konflik ini terus memanjang hingga saat ini. Tepat pada bulan Oktober 2023 membuka babak konflik baru antara Israel dan Palestina dengan diluncurkannya serbuan bom oleh Hamas ke wilayah Israel sebagai aksi balas dendam atas apa yang dilakukan Israel di jalur Gaza (Prihatna & Lewoleba, 2024: 12-13) .

Dalam penulisan ini, konflik Palestina-Israel akan dikaji lebih dalam menggunakan pemikiran salah seorang filsuf politik perempuan asal Jerman yang bernama Hannah Arendt. Arendt adalah seorang aktivis yahudi yang aktif dalam dunia politik organisasi zionis Jerman. Hannah Arendt dinilai sangat berani untuk mempublikasikan secara terang-terangan mengenai kejahatan yang dilakukan Nazi terhadap Yahudi. Identitas Arendt sebagai seorang Yahudi menghasilkan pemahaman tentang konsep perlawanan politik yang dibentuk akibat kekerasan kolonial yang dirasakannya.

Tiga karya utama Hannah Arendt yaitu *Eichmann (The Banality of Evil)*, *On Violence*, *The Origin of Totalitarianism*, telah menjadi pusat pemahaman mengenai bangkitnya kejahatan baru pada abad ke-20 dan psikologi orang-orang yang melakukan kekejaman tidak sepenuhnya menyadari tindakannya tersebut sebagai sebuah kekejaman. Hannah Arendt juga memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konsep totalitarianisme yang masih ada relevansinya dengan konflik modern dalam hubungan internasional ini. Konsep pemikiran Arendt membantu memperdalam pemahaman tentang kompleksitas dari konflik Israel-Palestina.

Pemikiran Hannah Arendt memaparkan pada kemampuannya untuk mengungkap dimensi yang sering diabaikan dalam sebuah diskursus konflik, yakni hubungan antara kekuasaan dan kekerasan. Arendt mengupas lebih dalam perbedaan dari kekuasaan dan kekerasan. Perspektif Arendt mengenai kekerasan dan kekuasaan ini akan memahami bagaimana kedua belah pihak ini dapat menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mendefinisikan dan mengontrol identitas kolektif. Sementara konsep totalitarianisme yang digambarkan Hannah Arendt dapat memahami lebih lanjut rezim yang mengandalkan kekerasan fisik, kontrol total atas kehidupan publik dan privat, serta upaya penghilangan identitas kolektif kelompok. Selain itu, konsep Banalitas Kejahatan dari Arendt ini dapat digunakan untuk menganalisis tindakan kejahatan tersistematis dan menjadi elemen yang memperparah ketegangan antara Palestina dan Israel ini. Dengan demikian, Kerangka pemikiran Hannah Arendt masih relevan untuk memahami pendekatan mengenai kompleksitas dari konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel .

Adapun rumusan masalah yang akan angkat dalam penulisan ini yaitu Bagaimana konsep-konsep utama dalam pemikiran Hannah Arendt yaitu totalitarianisme, kekuasaan dan kekerasan, serta banalitas kejahatan dapat digunakan untuk memahami dinamika konflik Palestina-Israel. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sehingga dapat dengan detail dan jelas memaparkan konflik Palestina dan Israel melalui kerangka pemikiran Hannah Arendt. Adapun terkait proses analisis data, penulis akan menggunakan teori pemikiran Hannah Arendt dalam mengkaji dinamika konflik Israel dan Palestina dan bagaimana teori ini dapat dijadikan solusi dari konflik ini.

Kemudian, teknik pengumpulan data dalam tulisan ini berbasis *internet based research*. Selain itu, pengumpulan data didapatkan dari jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya dan artikel berikat terkait konflik Palestina-Israel sebagai penunjang penulisan ini (Tanjung, 2022: 25). Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis relevansi kerangka pemikiran Hannah Arendt terhadap konflik yang

terjadi di antara Palestina dan Israel. Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih jelas dan mendalam mengenai sudut pandang Hannah Arendt mengenai totalitarisme, kekuasaan dan kekerasan, serta banalitas kejahatan dan relevansinya terhadap konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Totalitarianisme

Hannah Arendt dalam karyanya yaitu *The Origin of Totalitarianism* ini berpendapat bahwa fenomena politik baru pada abad ke-20 yaitu Totalitarianisme. Totalitarianisme ini muncul atas kombinasi dari ideologi dan teror (Edkins, J. 2019: 35). Arendt berpendapat bahwa tujuan dari bangkitnya totalitarianisme untuk membuat manusia tidak berarti dan menghancurkan spontanitas manusia itu sendiri, sehingga dapat mematikan jiwa manusia. Bagi Arendt, totalitarianisme merupakan bentuk kejahatan yang baru dan sangat radikal. Gerakan anti-semitisme, kemunduran negara-bangsa, ekspansionisme, dan aliansi antara kapital dan massa membangkitkan rezim totalitarianisme (Edkins, J. 2019: 35). Dalam menyebarkan propaganda ideologinya, media komunikasi menjadi alat utama dalam menyebarkan ideologi dan menggalangkan kekuatan massa.

Kemudian, Hannah Arendt berpendapat bahwa daya tarik dari ideologi totaliter yaitu memobilisasi penduduk dalam melakukan perintah yang memegang kekuasaan, bertumpu pada kehancuran konteks yang teratur dan stabil tempat orang-orang pernah hidup (Yar, M.) . Di bawah tirani rezim totaliter, potensi kebebasan berpikir itu dihilangkan, dan individu diperlakukan layaknya robot dan mesin yang otomatis dan sekedar berfungsi. Dengan demikian, Arendt membedah arsitektur totalitarisme bukan sekedar untuk mengupas kediktatoran politik melainkan untuk memperlihatkan mekanisme kognitif yang beroperasi di balik setiap rezim totaliter (Tan, P. 2024: 120).

B. Konsep Kekuasaan dan Kekerasan

Dalam sudut pandang Hannah Arendt, kekuasaan dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda (Edkins, J. 2019: 35). Kekuasaan sendiri terbentuk karena dilegitimasi oleh persetujuan dan dukungan dari kelompok yang bertindak bersama. Kekuasaan bukan sebagai alat dominasi atau kekerasan. Hal ini muncul ketika sekelompok orang bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama atau membahas kepentingan mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa kekuasaan ini merupakan suatu tindakan yang bersifat kolektif. Kekuasaan bukanlah milik dari individu, melainkan milik dari kelompok. Hal ini bersifat sementara dan dapat menghilang apabila kelompok tersebut tidak lagi bersatu atau bertindak bersama (Edkins, J. 2019: 36). Bagi Arendt, kekuasaan tidak pernah menjadi milik seseorang, tetapi milik kelompok politik yang mengamanatkannya kepada seseorang (Jena, Y. 2011:177). Dalam mempertahankan atau memperoleh kekuasaan, Arendt berpendapat bahwa tidak perlu menggunakan hal eksternal karena kekuasaan yang sejati tidak membutuhkan kekerasan untuk bertahan dan bersifat sebagai kapasitas kolektif.

Sementara itu, konsep kekerasan bagi Arendt yaitu alat untuk memaksakan kehendak. Dalam melakukan kekerasan maka dibutuhkan penggunaan alat atau kekuatan fisik untuk menguasai orang lain patuh kepada peraturan. Kekerasan hanya digunakan ketika kekuasaan hilang, karena orang yang benar-benar memiliki kekuasaan tidak memerlukan kekerasan untuk mengendalikan atau mengarahkan orang lain (Jena, Y. 2011:177). Jika kekerasan digunakan, maka akan menghancurkan dasar kebersamaan yang menjadi sumber kekuasaan. Kekerasan ini bersifat jangka pendek dan dapat mengganggu tatanan politik (Jena, Y. 2011:177).

C. Konsep Banalitas Kejahatan

Konsep “*The Banality of Evil*” atau Banalitas Kejahatan muncul pada karya Arendt yang berjudul *Eichmann in Jerusalem: A Report on The Banality of Evil* (1963). Arendt mengembangkan gagasan ini

berdasarkan pengamatannya terhadap seorang birokrat Nazi yang melarikan diri di Argentina. Ia dibawa ke Israel untuk diadili kejahatannya selama perang dunia kedua terkait pembunuhan kaum Yahudi di kamp-kamp konsentrasi Jerman (Watimena, 2011). Dari pengamatannya terhadap Adolf Eichmann maka muncul gagasan banalitas kejahatan yang merujuk pada situasi dimana kejahatan tidak lagi dirasakan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam sudut pandang konsep ini yaitu bahwa orang dalam melakukan kejahatannya itu bukan berarti dipenuhi oleh pikiran jahat namun dapat berpartisipasi aktif dalam suatu tindak kejahatan brutal.

Konsep Banalitas Kejahatan ini menunjukkan bahwa ketiadaan pemikiran (*thoughtlessness*) membuat suatu tindakan menjadi suatu hal yang terasa wajar, termasuk tindakan mengerikan atas yang dilakukan nazi terhadap kaum Yahudi (Watimena, 2011). Orang-orang biasa seperti Adolf Eichmann bukanlah orang yang jahat dan otoriter. Banyak orang yang menganggap bahwa pelaku kejahatan brutal adalah penjelmaan setan, dengan bentuk wajah yang sangat, matanya kejam, dan badannya besar. Namun, dalam kasus ini yaitu Eichmann adalah orang biasa yang cerdas dan patuh terhadap perintah penguasa. Arendt berpendapat bahwa ketercabutan dari realitas semacam itu dan ketiadaan pemikiran semacam itu dapat jauh lebih merusak dari semua pemikiran jahat, dan semua ini ada di dalam diri manusia. Menurut Arendt, banalitas kejahatan yang dilakukan Eichmann tidak bisa lepas dari situasi kengerian yang diciptakan oleh rezim totaliter Nazi, sehingga mengekang kebebasan berpikir individu itu sendiri (Tan, P. 2024: 120).

Ketiadaan pemikiran adalah sisi gelap manusia yang menjadi sumber dari lahirnya kejahatan. Arendt berpendapat bahwa Banalitas Kejahatan adalah kejahatan khas yang tidak pernah ditemukan sebelumnya sebelum abad kedua puluh. Bagi Arendt, orang-orang seperti Eichmann ini adalah orang yang dengan kenormalitasannya ini menjadi sangat menakutkan. Mereka digolongkan menjadi orang yang tidak berpikir. Ketiadaan pemikiran ini menyebabkan seseorang hilang rasa moralitas dalam dirinya dan tidak bisa membedakan mana yang benar atau salah (Kempalan News, 2022).

Banalitas kejahatan merupakan klaim normalitas dan normativitas. Dengan kata lain yang dimaksud dalam konsep ini yaitu seseorang tidak memiliki motivasi pribadi untuk melakukan kejahatan, melainkan semata-mata karena ketaatan kepada atasan, partai, ideologi, birokrasi, dan kekuasaan. Maka, dimensi moral kejahatan digantikan oleh klaim normalitas, sehingga apa yang secara moral jahat dianggap sebagai hal yang normal. Pengandaian moralitas tentang baik dan buruknya suatu tindakan digantikan oleh pernyataan-pernyataan normatif tentang ketaatan pada tugas dan perintah. Secara singkat, banalitas kejahatan berakar pada kesalahpahaman tentang apa arti menjadi warga negara (Tan, P. 2024: 121).

3. METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sehingga dapat dengan detail dan jelas memaparkan konflik Palestina dan Israel melalui kerangka pemikiran Hannah Arendt. Adapun terkait proses analisis data dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, menjelaskan konsep pemikiran Hannah Arendt untuk mengkaji konflik Palestina dan Israel. Kedua, menjelaskan analisis konflik Palestina Israel dalam kerangka pemikiran Hannah Arendt. Ketiga, yaitu implikasi dan refleksi filosofis dari perspektif Hannah Arendt. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam tulisan ini berbasis *internet based research*. Selain itu, pengumpulan data didapatkan dari jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya dan artikel berikht terkait konflik Palestina-Israel sebagai penunjang penulisan ini (Tanjung, 2022: 25).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Isu Palestina-Israel

Konflik Palestina dan Israel ini berawal dari surat perintah seorang perdana menteri Inggris pada saat itu yang bernama Arthur Balfour. Surat perintah ini yang sekarang dikenal sebagai Deklarasi Balfour berisi kesepakatan antara Arthur Balfour dengan komunitas Yahudi di Inggris (BBC News Indonesia). Mandat tersebut dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga pada tahun 1948. Dalam kurun waktu tersebut, Inggris memberikan sarana eksodus orang Yahudi ke Palestina. Migrasi kaum Yahudi secara besar-besaran ini tentu saja membangkitkan gelombang perlawanan dari warga Palestina. Mereka khawatir kaum Yahudi akan mengubah demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada kaum Yahudi.

Pada tahun 1947, populasi kaum Yahudi membengkak menjadi 33% di Palestina. Selain itu, militer Israel sudah memulai operasi militer dengan menghancurkan kota serta desa Palestina untuk memperluas perbatasan Israel. Operasi militer Israel telah membunuh sekitar 15.000 warga Palestina serta berhasil menguasai 78% wilayah Palestina (CNBC Indonesia, 2023). Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendirian negaranya tersebut. Hingga saat ini Israel terus melakukan invasi dan dehumanisasi wilayah dan warga Palestina sehingga telah menghilangkan banyak nyawa. Dengan demikian, kompleksitas konflik antara Palestina dan Israel ini dapat dikaji lebih dalam melalui perspektif Hannah Arendt terkait totalitarianisme, kekuasaan dan kekerasan, dan banalitas kejahatan.

B. Analisa Konflik Israel-Palestina Melalui Perspektif Pemikiran Hannah Arendt

1. Totalitarianisme dalam Konflik Palestina-Israel

Menurut Hannah Arendt, totalitarianisme adalah sistem kekuasaan yang berupaya menghilangkan keberagaman dan dominasi seluruh aspek kehidupan manusia melalui kontrol terpusat, ideologi tunggal melalui propaganda, dan penggunaan teror. Tindakan Israel dengan mengontrol ruang hidup warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza menunjukkan relevansinya dalam konsep totalitarianisme Hannah Arendt. Hal ini dapat dilihat dari pembatasan ruang gerak warga Palestina melalui tembok pemisah (*Israeli West Bank Barrier*) untuk mengisolasi sekitar 9 persen wilayah Palestina (Kompas.com, 2023), pos pemeriksaan militer, dan blokade ekonomi di Jalur Gaza. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan upaya Israel untuk mengendalikan segala aspek krusial kehidupan warga Palestina.

Selain itu, Israel melakukan marginalisasi identitas dengan membuat kebijakan pendudukan yang merampas hak palestina baik fisik maupun politik. Hal ini dapat dilihat dengan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang ilegal menurut hukum internasional (VOA Indonesia, 2023). Selain itu Israel terus melakukan pengusiran secara paksa warga Palestina sejak terjadinya peristiwa Nakba 1948 hingga saat ini. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dominasi Israel di wilayah Palestina sekaligus menghilangkan hak-hak masyarakat Palestina. Tindakan represif pihak Israel juga menunjukkan sikap totalitarianisme Hannah Arendt.

Kemudian, Israel melakukan Marginalisasi identitas yang bertujuan untuk menghapus identitas warga Palestina sehingga dapat menciptakan ruang bagi dominasi tunggal, mengabaikan sejarah multikultural Palestina dan hak asasi warga Palestina. Tindakan Israel tersebut juga menyoroti terkait propaganda ideologis zionisme untuk melakukan penghapusan identitas kolektif warga Palestina sehingga tidak ada ruang pluralitas di dalamnya. Hal ini merujuk pada konsep totalitarianisme Hannah Arendt yaitu propaganda sebagai alat penyebaran ideologi untuk membenarkan tindakan rezim totaliter dan memastikan legitimasi di mata pendukungnya.

Hannah Arendt berpendapat bahwa totalitarianisme juga berusaha menghapuskan hak asasi manusia dan kemampuan individu untuk terjun dalam kehidupan berpolitik. Israel secara terang-

terangan menolak hak Palestina untuk mendirikan negara merdeka (VOA Indonesia, 2024). Oleh karena itu, Israel terus menerus memperkuat kekuasaannya dengan melakukan serangan militer ke wilayah Palestina. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pendudukan militer Israel di wilayah Palestina mencerminkan elemen-elemen totalitarianisme Hannah Arendt yaitu dominasi total, penghapusan pluralitas, dan penggunaan teror tersistematis. Kebijakan yang dilakukan Israel menghancurkan kehidupan dasar masyarakat Palestina dan menghapus ruang politik untuk memperjuangkan hak-hak warga Palestina.

2. Kekuasaan dan Kekerasan dalam Konflik Palestina-Israel

Peran Kekuasaan Palestina dan Israel

Menurut sudut pandang Hannah Arendt, kekuasaan muncul ketika sekelompok orang bertindak bersama-sama secara kolektif. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Palestina mempertahankan wilayahnya. Pada awal perjuangannya, Organisasi Pembebasan Palestina berusaha membangun kekuasaan melalui konsensus internasional, salah satunya Perjanjian Oslo 1993 agar kedua belah pihak dapat berdiri berdampingan secara damai (Kompas.com, 2023). Namun, perjanjian ini gagal untuk menghasilkan kemerdekaan penuh bagi Palestina dan mengakhiri konflik berkepanjangan ini. Selain itu, konflik internal antara Hamas dan Fatah menjadi penyebab melemahnya kekuasaan yang kolektif di dalam wilayah Palestina. Perbedaan visi perjuangan menghambat upaya membangun legitimasi kekuasaan Palestina dengan kuat. Hal ini berdampak pada hilangnya dasar kolektif Palestina dalam perjuangan politik menurut perspektif Hannah Arendt.

Sedangkan pada sisi Israel, kekuasaan muncul karena adanya legitimasi konsensus internasional atau penerimaan bersama. Dalam konteks ini, Israel berhasil memanfaatkan dukungan internasional, salah satunya Amerika Serikat, untuk memperkuat posisinya di kancah global. Dukungan ini memberikan legitimasi terhadap kebijakan internasional Israel di tingkat internasional. Meskipun Israel mendapatkan banyak kecaman, namun pendukung di belakang Israel yaitu negara-negara besar yang memberikan pasokan senjata untuk Israel sehingga dapat melakukan invasi ke wilayah Palestina.

Peran Kekerasan Palestina dan Israel

Kekerasan dalam sudut pandang Arendt yaitu merujuk pada alat destruktif yang digunakan untuk memaksakan kehendaknya. Kekerasan dalam konteks Palestina yaitu merujuk pada gerakan perlawanan yang dilakukan Palestina untuk mempertahankan wilayahnya dan respon atas ketidaksetaraan kekuasaan yang diterimanya. Perlawanan yang dilakukan Palestina oleh Kelompok Hamas dengan menggunakan senjata seperti roket dan serangan bunuh diri (VOA Indonesia, 2024). Namun, penggunaan kekerasan yang dilakukan kelompok Hamas justru dapat dikategorikan sebagai alat destruktif. Bagi Arendt, kekerasan yang dilakukan kelompok Hamas akan merusak kekuasaan kolektif mereka. Hal ini disebabkan karena kekerasan tidak membangun konsensus internasional, namun justru melemahkan posisi Palestina di tingkat global.

Sementara itu, kekerasan dalam konteks Israel yaitu digunakan untuk mempertahankan kependudukannya di wilayah Palestina. Operasi militer yang dilakukan Israel dengan mengirimkan serangan roket untuk menghancurkan wilayah Palestina dan blokade (Haboush, M. M. 2024) ekonomi di Gaza sebagai alat untuk mempertahankan pendudukannya. Bagi Arendt, ketergantungan Israel melakukan kekerasan ini sebagai tanda melemahnya kekuasaan yang dimiliki Israel di wilayah Palestina. Oleh karena itu Israel menggunakan kekerasan sebagai langkah terakhir untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya yang tidak stabil.

3. Banalitas Kejahatan dalam Konflik Palestina-Israel

Konsep banalitas kejahatan menurut Arendt mengacu pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu bukan karena memiliki niat jahat, namun mereka melakukannya semata-mata karena menjalankan tugas dan mematuhi sistem tanpa mengkritisi tugas yang diterimanya tersebut. Selain itu, mereka juga tidak akan memikirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Dalam konteks konflik Palestina-Israel ini, konsep banalitas kejahatan dapat digunakan untuk menganalisis kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel dalam sistem yang terstruktur dan terlegitimasi.

Pertama yaitu dehumanisasi warga Palestina. Warga Palestina diperlakukan bukan sebagai manusia yang memiliki hak hidup, namun sebagai sebuah ancaman bagi warga Israel. Oleh karena itu, penghilangan hak warga Palestina menjadi suatu yang normal dalam kebijakan yang diambil Israel. Salah satu contohnya yaitu tentara Israel yang melakukan penghancuran rumah warga Palestina untuk melaksanakan tugas yang sudah terstruktur oleh sistem pendudukan Israel itu sendiri. Tentara yang melakukan penghancuran rumah tersebut tidak menyadari dampak psikis dan moral yang ditimbulkan karena menyadari bahwa kegiatan ini sebagai sebuah rutinitas untuk mematuhi aturan atasannya.

Kedua yaitu kebijakan blokade di Gaza sebagai sebuah banalitas kejahatan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Kebijakan ini melumpuhkan sendi-sendi perekonomian kehidupan di Jalur Gaza. Selain itu juga membatasi ruang hidup warga Palestina. Namun bagi Israel, kebijakan ini dirancang untuk menjaga keamanan nasional dari wilayah Israel itu sendiri tanpa memikirkan dampak penderitaan massal yang dirasakan oleh warga Palestina. Kebijakan blokade ini memperparah kondisi hidup warga Palestina. Keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti bahan pangan, air, dan listrik, membuat kehidupan di Gaza menjadi tidak memenuhi standar kelayakan. Akan tetapi, Israel menganggap bahwa kebijakan ini sebagai sebuah langkah menjaga keamanan yang dinormalisasikan oleh sistem, sehingga mereka tidak menyadari dampak penderitaan massal yang dirasakan oleh warga Palestina.

Ketiga, kegagalan publik global dalam berpartisipasi rekonsiliasi konflik Palestina-Israel. Konsep banalitas kejahatan dari Hannah Arendt ini dapat terlihat dari absennya rasa empati serta tanggung jawab organisasi internasional untuk bisa membantu menghentikan kasus ini. Terlebih lagi seperti PBB sebagai organisasi internasional dinilai tidak efektif untuk melakukan intervensi terhadap kasus ini (Antara News, 2023). Selain itu, masyarakat global yang bersikap apatis ini menunjukkan elemen banalitas kejahatan Hannah Arendt karena kurang refleksi moral individu untuk menyadari bahwa kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina ini bukanlah suatu kejahatan yang dinormalisasikan dan harus segera dihentikan.

Dengan demikian, konsep banalitas kejahatan dari Hannah Arendt dalam mengkaji konflik Palestina-Israel dapat membantu untuk memahami kejahatan besar terhadap kemanusiaan dapat terjadi melalui tindakan rutin yang terlembaga. Pihak Israel seringkali tidak dapat berpikir kritis dan hanya mematuhi aturan yang sudah ada, sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan struktural tanpa henti. Selain itu, hilangnya rasa tanggung jawab kolektif dari masyarakat global juga menunjukkan elemen banalitas kejahatan Hannah Arendt sehingga menghambat penghentian konflik keduanya.

C. Implikasi dan Refleksi Filosofis terhadap Pemikiran Hannah Arendt dan Dinamika Konflik

1. Implikasi terhadap konflik Israel-Palestina

Pemikiran Hannah Arendt terkait konsep totalitarisme serta kekerasan dan kekuasaan ini menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami dinamika konflik Palestina-Israel. Pemikiran Arendt menunjukkan bahwa sistem berbasis kekerasan dan kontrol sistematis ini cenderung menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi sebuah hambatan nyata untuk menghalangi tercapainya solusi damai yang berkelanjutan. Hannah Arendt juga menggarisbawahi bahwa kekerasan tidak dapat menciptakan konsensus bersama.

Dalam konteks konflik Palestina-Israel, penggunaan kekerasan yang dilakukan kedua pihak ini, baik dalam bentuk militer, blokade, dan perluasan pemukiman ilegal, menunjukkan kegagalan dalam menciptakan legitimasi dan konsensus di antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, penggunaan kekerasan ini juga menunjukkan adanya kelemahan kedua belah pihak yang bersengketa dalam menemukan titik tengah untuk mengakhiri konflik. Penggunaan kekerasan ini juga melemahkan proses membangun kekuasaan yang sah dan stabil untuk menciptakan perdamaian. Penggunaan kekerasan yang secara berkelanjutan dan tersistematis akan mendukung menciptakan ketegangan tanpa henti. Ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Palestina tidak dapat dihindari akan bangkitnya respon radikal, termasuk perlawanan kekerasan. Ini memvalidasi narasi keamanan Israel yang mendukung penggunaan kekerasan lebih lanjut.

Berdasarkan kerangka pemikiran Hannah Arendt, konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel justru terus menerus melanggar prinsip pluralitas dalam berpolitik. Hambatan terbentuknya pluralitas ini karena adanya ketimpangan kekuasaan kedua belah pihak dan adanya narasi internasional yang bias sehingga menghalangi terciptanya ruang dialog yang setara. Penggunaan kekerasan ini juga menghancurkan rasa kepercayaan di antara kedua pihak. Kekerasan justru membangkitkan rasa kebencian kolektif sehingga menghambat proses rekonsiliasi konflik.

Hannah Arendt melalui teorinya tentang kekerasan, kekuasaan, totalitarisme, dan banalitas kejahatan, memberikan wawasan yang relevan mengenai risiko dehumanisasi jangka panjang dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Melalui pemikirannya, Arendt melihat dehumanisasi sebagai salah satu akibat terburuk dari sistem berbasis kekerasan yang tidak hanya merusak hubungan antara pihak yang berkonflik, namun juga menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dehumanisasi ini merupakan dampak kekerasan sistemik. Kebijakan kontrol yang diterapkan Israel, seperti blokade Gaza, telah mencabut hak-hak dasar warga Palestina. Selain itu, dehumanisasi mampu menghilangkan identitas kolektif warga Palestina dalam menentukan nasib sendiri. Dehumanisasi juga menyebabkan warga Palestina kehilangan elemen budaya dan sejarahnya. Jika dilihat dari konsep kekerasan Arendt, dehumanisasi sebagai alat justifikasi kekerasan. Dehumanisasi memungkinkan penggunaan kekerasan ekstrem dengan mereduksi pihak lawan menjadi bukan manusia. Dehumanisasi juga menjadi alat pembenaran kedua belah pihak untuk melakukan kekerasan dan memperkuat pendekatan represif.

2. Relevansi Pemikiran Hannah Arendt

Pemikiran Hannah Arendt dapat menyoroti refleksi kritis atas pelanggaran moral, kekerasan, dan dehumanisasi yang melanggar hak manusia dalam berpolitik. Melalui konteks konflik Palestina-Israel, refleksi ini menjadi elemen penting untuk memahami peran individu dalam memperkuat atau melemahkan sistem yang menciptakan ketidakadilan. Konsep Banalitas Kejahatan Hannah Arendt menunjukkan individu seringkali terlibat dalam tindakan yang tidak bermoral bukan karena adanya dorongan kebencian ekstrem, namun karena kegagalan berpikir secara kritis terhadap suatu sistem, aturan, maupun perintah.

Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan tentara Israel seperti pemukiman ilegal dan blokade ekonomi yang dijalankan semata-mata untuk mematuhi arahan dari atasan tanpa

mempertanyakan dampak tindakannya terhadap hak-hak warga Palestina. Perintah yang dijalankan oleh para tentara Israel ini menciptakan budaya tindakan represif terhadap warga Palestina merupakan sesuatu yang normal. Sedangkan dari sisi Palestina, kelompok Hamas mengadopsi tindakan kekerasan terhadap warga sipil Israel sebagai aksi balas dendam namun ketiadaan refleksi yang mendalam tentang konsekuensi jangka panjangnya. Hal ini menunjukkan elemen konsep Banalitas Kejahatan yang mana seorang individu dalam kondisi ketiadaan pemikiran dalam bertindak sesuatu. Arendt mengingatkan bahwa kegagalan untuk berpikir secara kritis dapat memungkinkan ketidakadilan itu terus berjalan, bahkan oleh individu-individu yang pada dasarnya tidak memiliki niat kebencian atau kejahatan.

Relevansi pemikiran Hannah Arendt dengan konflik Palestina-Israel ini menunjukkan bahwa pemikiran kritis terhadap tindakan individu dalam sistem politik adalah kunci untuk mengakhiri konflik berkepanjangan ini. Ketika kedua belah pihak mulai mempertanyakan penggunaan kekerasan dan bertindak berdasarkan moralitas universal maka membuka pintu peluang untuk penyelesaian konflik dan memulai pintu perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan kedua belah pihak ini dengan membuka ruang dialog publik yang bersifat pluralitas dan inklusi. Dengan demikian maka terbukanya pintu untuk menciptakan perdamaian dan kekuasaan yang bersifat inklusif dan setara.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, analisis mengenai konflik Palestina-Israel dengan pendekatan Hannah Arendt dapat dirangkum menjadi tiga poin sebagai berikut,

- Pertama, konflik Palestina-Israel dapat dikatakan relevan dengan pemikiran Hannah Arendt. Konflik ini telah memberikan dampak yang amat mendalam khususnya dalam hilangnya hak-hak individu dalam kewarganegaraan. Dampak tersebut sesuai dengan elemen-elemen totalitarianisme yang telah dipaparkan oleh Hannah Arendt. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemikiran Hannah Arendt tetap dapat digunakan untuk mengkaji konflik global era kontemporer ini.
- Kedua, tiga konsep yang dikaji dalam penulisan ini yaitu konsep totalitarianisme, kekuasaan dan kekerasan, serta banalitas kejahatan telah memudahkan pemahaman atas konflik Palestina-Israel. Hal ini dapat dilihat dari tindakan represif yang terjadi dalam konflik ini menunjukkan totalitarianisme terbentuk akibat adanya kontrol sistematis, kekerasan sebagai alat dominasi dan legitimasi kekuasaan, serta banalitas kejahatan yang muncul akibat kegagalan dalam berpikir kritis individu. Ketiga konsep tersebut menjadi elemen utama dalam memperkuat ketimpangan sosial dan kekuasaan serta memperparah konflik ini.
- Ketiga, pemikiran Hannah Arendt menawarkan sebuah solusi untuk keluar dari dinamika konflik berkepanjangan ini. Pemikiran Hannah Arendt mendorong dengan dibukanya ruang dialog yang setara dan inklusif. Selain itu, dibutuhkan upaya internasional untuk menciptakan ruang politik yang inklusif dan setara untuk Palestina dan Israel sehingga dapat menghentikan konflik ini. Pemikiran Arendt juga mendorong warga dunia untuk menciptakan ruang dimana setiap warga dunia untuk menciptakan ruang dialog dan menghormati hak asasi manusia untuk terciptanya dunia yang inklusif dan penuh perdamaian.

REFERENSI

- [1] Antara News. (2023, Oktober). *Mengapa PBB tidak bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina?* Diambil dari <https://www.antaranews.com/berita/3789441/mengapa-pbb-tidak-bisa-selesaikan-konflik-israel-palestina>
- [2] BBC News Indonesia. (2023, Oktober). *Sejarah konflik Palestina-Israel, pertikaian berkepanjangan yang berlangsung puluhan tahun.* Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po>
- [3] CNBC Indonesia. (2023, Desember). *Sejarah konflik Israel-Palestina, perang hingga akhir zaman?* Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231224103055-4-500024/sejarah-konflik-israel-palestina-perang-hingga-akhir-zaman>
- [4] Edkins, J., & Pin-Fat, V. (2009). *Critical theorists and international relations* (Chapter 3: Hannah Arendt, pp. 31-41). Routledge
- [5] Haboush, M. M. M. (2024, April). *Israel persempit ruang hidup rakyat Gaza dengan blokade selama 17 tahun.* Diambil dari <https://www.aa.com.tr/id/budaya/israel-persempit-ruang-hidup-rakyat-gaza-dengan-blokade-selama-17-tahun/3148975>
- [6] Jena, Y. (2011). *Pemikiran Hannah Arendt mengenai kekerasan dalam kekuasaan.* DISKURSUS-JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA, 10(2), 166-190.
- [7] Kempalan News. (2022, Februari). *Hannah Arendt dan banalitas kejahatan politik kita.* Diambil dari https://kempalan.com/2022/02/21/hannah-arendt-dan-banalitas-kejahatan-politik-kita/#google_vignette
- [8] Kompas.com. (2023, Oktober). *Tembok pemisah Israel, dibangun setinggi 9 meter.* Diambil dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/14/180000079/tembok-pemisah-israel-dibangun-setinggi-9-meter>
- [9] Kompas.com. (2023, November). *Perjanjian Oslo, upaya damai Israel dan Palestina yang kandas.* Diambil dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/20/203000279/perjanjian-oslo-upaya-damai-israel-dan-palestina-yang-kandas?page=all>
- [10] Prihatna, C. N., & Lewoleba, K. K. (2024). *Analisis peran Mahkamah Internasional PBB dalam penegakan hukum kejahatan genosida oleh Israel terhadap Palestina. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(1), 11-20.
- [11] Tanjung, N. F. (2022). "Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam merespons dominasi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik". *Disertasi PhD, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Diambil dari <https://repository.umj.ac.id/9348/12/12.%20BAB%20III.pdf>
- [12] Tan, P. (2024). *Totalitarianisme, banalitas kejahatan dan kebebasan berpikir: Refleksi bersama Hannah Arendt.* *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(1), 119-130. [13] Wilkinson, M. (1996). *Rapid automatic segmentation of fluorescent and phase-contrast images of bacteria.* *Fluorescence Microscopy And Fluorescent Probes.* New York, NY: Plenum Press.
- [13] VOA Indonesia. (Juni, 2023). *Netanyahu: Pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat tak halangi upaya perdamaian.* Diambil dari <https://www.voaindonesia.com/a/netanyahu-pembangunan-permukiman-israel-di-tepi-barat-tak-halangi-upaya-perdamaian-/7131435.html>
- [14] VOA Indonesia. (Februari, 2024). *Kabinet Israel tolak pengakuan sepihak atas negara Palestina.* Diambil dari <https://www.voaindonesia.com/a/kabinet-israel-tolak-pengakuan-sepihak-atas-negara-palestina/7493207.html>
- [15] VOA Indonesia. (Agustus, 2024). *Hamas, Jihad Islam klaim serangan 'bunuh diri' di Tel Aviv.* Diambil dari <https://www.voaindonesia.com/a/hamas-jihad-islam-klaim-serangan-bunuh-diri-di-tel-aviv/7748783.html>

- [16] Watimena, R. A. A. (Desember, 2011). *Hannah Arendt, banalitas kejahatan, dan situasi Indonesia*. Diambil dari <https://rumahfilsafat.com/2011/12/26/hannah-arendt-banalitas-kejahatan-dan-situasi-indonesia/>
- [17] Yar, M. (n.d.). *Hannah Arendt (1906–1975)*. Diambil dari <https://iep.utm.edu/hannah-arendt/#H3>